



KEMENTERIAN KEUANGAN  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

**KPKNL**  
Palangkaraya

# LAPORAN KINERJA 2022





**LAPORAN KINERJA  
KPKNL PALANGKA RAYA  
2022**

Nilai - Nilai  
Kementerian Keuangan



## Integritas

Berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

## Profesionalisme

Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

## Sinergi

Membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

## Pelayanan

Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.

## Kesempurnaan

Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

# DAFTAR ISI

<b>PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	<b>1</b>
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi KPKNL Palangka Raya .....	<b>1</b>
C. Peran Strategis KPKNL Palangka Raya .....	<b>4</b>
D. Sistematika Laporan .....	<b>5</b>
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Rencana Strategis .....	<b>6</b>
B. Pengukuran Kinerja .....	<b>10</b>
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	<b>12</b>
B. Kinerja Lainnya .....	<b>16</b>
C. Realisasi Anggaran .....	<b>17</b>
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Penutup .....	<b>18</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# PENGANTAR

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangka Raya Tahun 2022 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan atau sasaran strategis DJKN pada tingkat KPKNL Tahun Anggaran 2022. Laporan Kinerja ini sekaligus menjadi alat monitoring dan evaluasi kinerja KPKNL Palangka Raya dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan kekayaan negara, piutang negara dan pelayanan lelang kepada *stakeholder* dan masyarakat pengguna layanan.

Laporan Kinerja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta nota dinas dari Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: ND-4448/KN.1/2022 tanggal 22 Desember 2022 tentang Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2022. Laporan Kinerja ini dapat berfungsi sebagai alat untuk menilai kinerja KPKNL Palangkaraya secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas, transparansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka perwujudan *good governance*.

Berdasarkan laporan capaian kinerja tahun 2022, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Palangka Raya sebesar 114,06%. NKO tersebut merupakan hasil perhitungan capaian IKU/Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three*, dengan rincian sebanyak 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Hasil tersebut merupakan capaian kinerja yang akan menjadi dasar untuk usul penetapan target dalam mengajukan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 serta dasar pengambilan kebijakan atau langkah-langkah guna pencapaian target tahun berikutnya.

Kami harapkan Laporan Kinerja ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KPKNL Palangka Raya tahun 2022 dan menjadi tolak ukur kegiatan di saat ini dan di masa depan. Kepada semua pegawai yang telah menyumbangkan karsa dan karya dalam mewujudkan akuntabilitas

kinerja KPKNL Palangka Raya kami berikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Palangka Raya, 02 Februari 2023

**Kepala Kantor**



*Sigit Budi Prabowo*  
**R. B. Sigit Budi Prabowo**

# IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja KPKNL Palangka Raya Tahun 2022 adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja KPKNL selama tahun 2022 yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, Laporan Kinerja KPKNL Palangka Raya Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada KPKNL atas penggunaan anggaran.

Untuk mewujudkan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada KPKNL tersebut ditetapkan 5 (lima) misi, yaitu:

Mewujudkan optimalisasi pengelolaan kekayaan negara;

Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;

Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;

Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.

Mewujudkan lelang yang efisien, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrument jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategis organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL adalah terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang yang profesional, tertib, tepat guna, dan optimal serta mampu membangun citra baik bagi stakeholder.

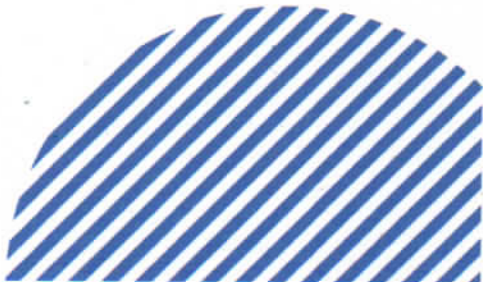


Seiring dengan perjalanan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan mengacu pada visi dan misi tersebut, serta untuk mencapai tujuan yang akan diraih, maka dirumuskan sasaran strategis dengan menggunakan pendekatan Balance Scorecard (BSC) yang dituangkan dalam peta strategis. Pengukuran kinerja dalam BSC merupakan penilaian terhadap indikator kinerja utama (IKU) yang telah diidentifikasi untuk mencapai sasaran strategis dan tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi KPKNL Palangka Raya tahun 2022.

KPKNL Palangka Raya memperoleh pencapaian terhadap 11 (sebelas) Sasaran Strategis dan 19 (sembilan belas) IKU tahun 2022 sebesar 114,06%. Pencapaian tersebut sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

**Bagan 1.**  
Rincian Capaian Kinerja KPKNL Palangka Raya

Stakeholder (25%)	Customer Perspective (15%)	Internal Process Perspective (30%)	Learning & Growth Perspective (30%)
✓ Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	✓ Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	✓ Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	✓ SDM yang Kompeten
	✓ Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	✓ Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	✓ Organisasi yang <i>Fit For Purpose</i>
		✓ Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	✓ Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal
		✓ Edukasi yang Efektif	
		✓ Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	

Sebagai unit vertikal yang memberikan pelayanan, KPKNL akan terus memperbaiki dan meningkatkan pelayanan untuk memberikan kepuasan terhadap pemangku kepentingan. Untuk itu, KPKNL Palangka Raya akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi, sehingga kualitas KPKNL Palangka Raya sebagai unit vertikal DJKN yang kondusif semakin meningkat.



# BABI PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Salah satu asas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPKNL dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2022. Laporan kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KPKNL PALANGKA RAYA

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palangka Raya merupakan kantor operasional yang berada di bawah Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang pengelolaan negara, penilaian, piutang negara, dan pelayanan lelang.

Dalam melaksanakan tugas tersebut KPKNL menyelenggarakan fungsi:

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi, dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. Registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;
4. Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. Pelaksanaan pelayanan lelang;
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang;
8. Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan;
9. Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain;
10. Pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;
11. Inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;
12. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;
13. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;

14. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Susunan organisasi KPKNL Palangka Raya sampai dengan akhir tahun 2022 yaitu :

**Diagram 1.1**

Struktur Organisasi KPKNL Palangka Raya

**STRUKTUR ORGANISASI KPKNL PALANGKA RAYA**



Dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang dilakukan, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan didukung oleh sumber daya manusia yang ada pada KPKNL Palangka Raya yang berjumlah :

**Tabel 1.1**

Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Golongan

TINGKAT PENDIDIKAN	GOLONGAN RUANG				JUMLAH
	I	II	III	IV	
SD	-	-	-	-	-
SLTP	-	-	-	-	-
SMA/SMK	-	1	3	-	4
DI	-	-	-	-	-
DIII	-	6	3	-	9
DIV/S1	-	-	9	1	10
S2	-	-	1	2	3
S3	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>	-	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>26</b>

**Tabel 1.2**  
Komposisi Pegawai Berdasarkan Umur dan Golongan

KELOMPOK UMUR	GOLONGAN RUANG				JUMLAH
	I	II	III	IV	
18-30	-	5	1	-	6
31-40	-	1	4	-	5
41-50	-	1	3	1	5
Di atas 50	-	-	8	2	10
JUMLAH	-	7	16	3	26

**Tabel 1.3**  
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan

JENIS KELAMIN	GOLONGAN RUANG				JUMLAH
	I	II	III	IV	
Perempuan	-	4	3	-	7
Laki-laki	-	3	13	3	19
JUMLAH	-	7	16	3	26

**Tabel 1.4**  
Komposisi Tenaga Fungsional

No	Fungsional	Jumlah
1	Jafung Pelelang	2
2	Juru Sita	6
3	Pemeriksa Piutang Negara	5
4	Jafung Penilai	2
5	Pranata Keuangan APBN	1
Jumlah		16

### C. PERAN STRATEGIS KPKNL PALANGKA RAYA

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang, KPKNL Palangka Raya memiliki peran strategis sebagai berikut :

#### 1. Pengelolaan Kekayaan Negara

Sebagai pengelola kekayaan negara, KPKNL Palangka Raya memiliki peran strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peningkatan daya guna kekayaan negara terutama difokuskan pada utilisasi kekayaan negara dan pembinaan serta penatausahaan kekayaan negara. Sebagai aset *manager*, KPKNL Palangka Raya mengemban tugas untuk menata manajemen aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas APBN, yaitu melalui optimalisasi aset dalam peningkatan pendapatan negara, penghematan belanja modal, dan belanja pemeliharaan.

KPKNL Palangka Raya sebagai kantor operasional di daerah yang melayani langsung satuan kerja di lingkungan Kementerian/Lembaga di wilayah kerja KPKNL Palangka Raya dengan memberikan layanan di bidang pengelolaan kekayaan negara antara lain penetapan status penggunaan BMN berupa tanah dan/atau bangunan, persetujuan/penolakan penjualan BMN selain tanah dan/atau bangunan, pemindahtanganan BMN, Pemanfaatan BMN, inventarisasi dan sertifikasi.

#### 2. Penilaian Kekayaan Negara

Penilaian terhadap kekayaan negara yang merupakan langkah awal dari proses pengelolaan kekayaan negara setelah dilakukan inventarisasi. Hasil penilaian kekayaan negara antara lain digunakan untuk penyusunan rencana pemerintah pusat, pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN, penerbitan SBSN, dan pengurusan piutang negara. Dengan demikian hasil, penilaian juga dapat membantu mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *Highest and Best Use*.

#### 3. Pelayanan Lelang

Pelayanan lelang bertujuan menjadikan lelang sebagai instrumen jual beli yang dikenal secara umum sebagaimana transaksi pasar pada umumnya. Lelang juga merupakan pelaksanaan eksekusi terhadap suatu putusan/penetapan pengadilan maupun PUPN. Lelang mempunyai nilai lebih apabila dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu transparan, akuntabel, kompetitif, efisien, dan lebih menjamin kepastian hukum. Dalam setiap pelaksanaan lelang dibuat Risalah Lelang yang merupakan akta otentik yang berfungsi sebagai akta dan transport untuk kepentingan peralihan hak.

#### 4. Pengurusan Piutang Negara

Pengurusan Piutang Negara merupakan pelayanan yang diberikan kepada instansi/badan/lembaga negara yang memiliki piutang yang telah jatuh tempo dan dinyatakan macet sehingga sulit tertagih setelah dilakukan upaya penagihan. Piutang yang macet yang sulit tertagih tersebut dapat diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang

Negara (PUPN) yang pengurusannya diselenggarakan oleh KPKNL sebagai upaya penyelamatan keuangan negara sekaligus upaya penegakan hukum (*Law enforcement*) dalam masyarakat.

5. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Dalam melaksanakan pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang, KPKNL memperoleh hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berupa Biaya Administrasi (biad) pengurusan piutang negara dan bea lelang yang selanjutnya disetorkan ke kas negara sesuai dengan *Standard Operating Procedure* yang berlaku. Selain itu, dari hasil pemanfaatan BMN juga termasuk dalam PNBP yang disetor oleh Kementerian/Lembaga yang asetnya dimanfaatkan.

#### D. SISTEMATIKA LAPORAN

Untuk memudahkan dalam memahami isi laporan ini, maka digunakan sistematika pelaporan sebagai berikut:

Ikhtisar Eksekutif

BAB I    Pendahuluan

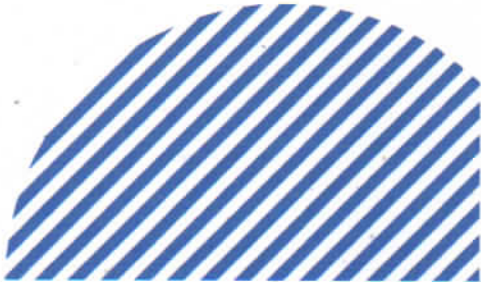


BAB II   Perencanaan Kinerja

BAB III  Akuntabilitas Kinerja

BAB IV  Penutup

Lampiran

Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana yang ditetapkan selama tahun 2022, KPKNL Palangka Raya telah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti diuraikan dalam BAB II Laporan ini. Dengan disusunnya LAKIN KPKNL Palangka Raya Tahun 2022 diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan untuk meningkatkan kinerja KPKNL Palangka Raya di tahun yang akan datang.



**BAB II**  
**PERENCANAAN**  
**KINERJA**

## A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis. Dalam mengemban tugas dan fungsi, KPKNL Palangka Raya **"Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung Kementerian Keuangan Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"**.

Untuk merealisasikan tersebut, KPKNL Palangka Raya mempunyai misi sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efisien, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

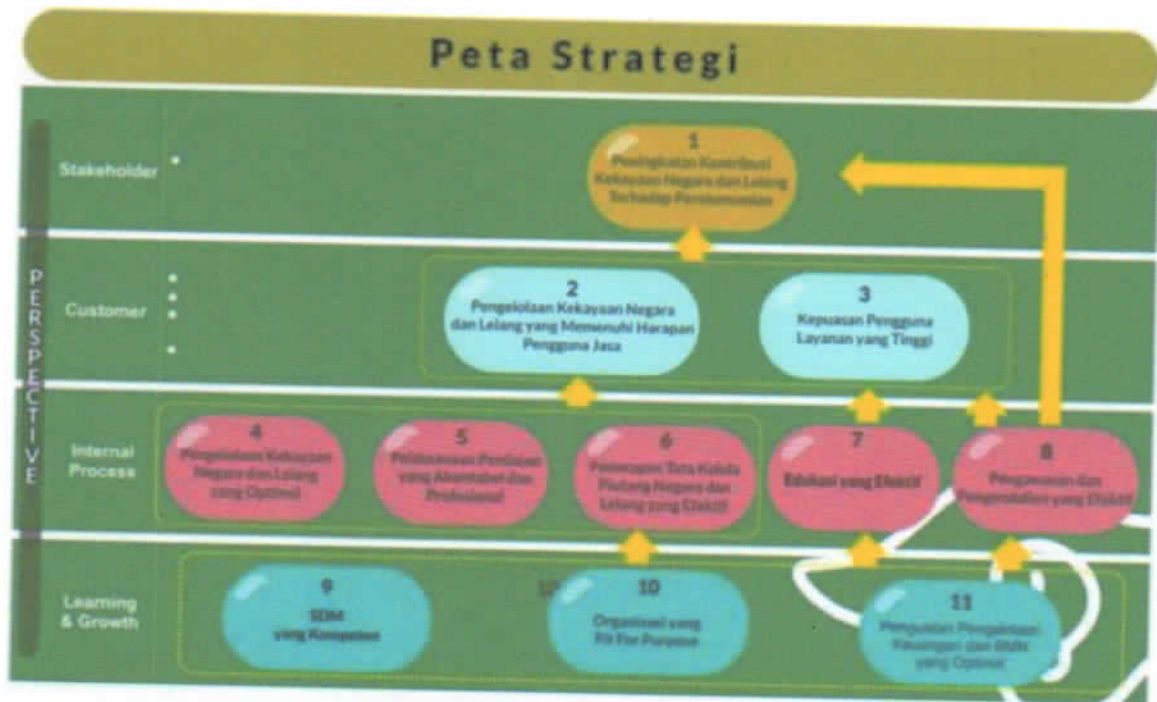
Atas dasar visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL Palangka Raya adalah pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial; pelayanan lelang yang modern dan terpercaya; pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien serta birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien.

Pada dasarnya sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara spesifik, dalam jangka pendek dan terukur. Sasaran yang hendak dicapai oleh KPKNL Palangka Raya adalah :

1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian;
2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa;
3. Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi;
4. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal;
5. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional;
6. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif;
7. Edukasi yang Efektif;
8. Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif;
9. SDM yang Kompeten;
10. Organisasi yang Fit For Purpose;
11. Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal

Kesebelas belas sasaran yang hendak dicapai tersebut dapat tergambar dalam peta strategi KPKNL Palangka Raya tahun 2022 sebagai berikut :

**Bagan 2.1**  
Peta Strategi 2022 KPKNL Palangka Raya



Peta Strategi KPKNL Palangka Raya menerapkan 4 (empat) perspektif, yaitu: *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. *Stakeholder perspective* berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh *stakeholder*. *Customer perspective* berisi ekspektasi dari *customer* dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. *Internal process perspective* berisi proses bisnis seperti apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Sementara *learning and growth perspective* berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang diharapkan. Dari Peta Strategi KPKNL Tahun 2022 tersebut diketahui bahwa jumlah sasaran strategis sebanyak 11 (sebelas) dan IKU yang diidentifikasi sebanyak 19 (sembilan belas) IKU. Selanjutnya, keterkaitan antara sasaran strategis dan IKU dapat disajikan dalam tabel berikut:

**Sasaran Strategis 1**

Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian

	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.1	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	%	100
1.2	Persentase produktivitas lelang	%	36

**Sasaran Strategis 2**

Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

Indikator Kinerja		Satuan	Target
2.1	Persentase Realisasi Pokok Lelang	%	100
2.2	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	%	100

**Sasaran Strategis 3**

Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi

Indikator Kinerja		Satuan	Target
3.1	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	Indek	4,55

**Sasaran Strategis 4**

Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

Indikator Kinerja		Satuan	Target
4.1	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	%	65
4.2	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	%	100
4.3	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	%	100
4.4	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	%	100

**Sasaran Strategis 5**

Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

Indikator Kinerja		Satuan	Target
5.1	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	%	19

**Sasaran Strategis 6**

Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

Indikator Kinerja		Satuan	Target
6.1	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	%	92
6.2	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	%	10

**Sasaran Strategis 7**

Edukasi yang Efektif

Indikator Kinerja		Satuan	Target
7.1	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	%	88

**Sasaran Strategis 8**

Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

Indikator Kinerja		Satuan	Target
8.1	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan pengelolaan kekayaan negara	%	85

**Sasaran Strategis 9**

SDM yang Kompeten

Indikator Kinerja		Satuan	Target
9.1	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	%	100

**Sasaran Strategis 10**

Organisasi yang Fit For Purpose

Indikator Kinerja		Satuan	Target
10.1	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	%	80
10.2	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	%	90

**Sasaran Strategis 11**

Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal

Indikator Kinerja		Satuan	Target
11.1	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	%	95,5
11.2	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	%	100

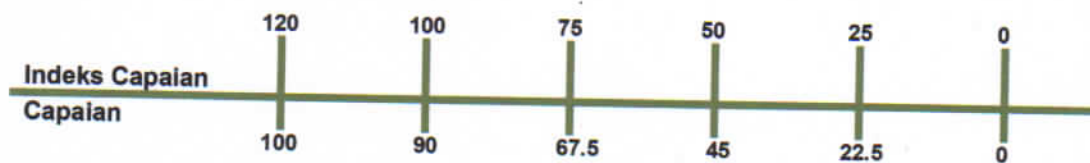
Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, KPKNL Palangka Raya melaksanakan program yaitu :

1. Program peningkatan terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang professional, tertib dan optimal;
2. Program peningkatan tersajinya informasi jumlah dan nilai wajar kekayaan negara;
3. Program peningkatan kualitas pelayanan pengurusan piutang negara yang professional, tertib, tepat guna dan optimal;
4. Program peningkatan penilaian yang akuntabel;
5. Program peningkatan kualitas pelayanan lelang;
6. Program peningkatan kualitas penyajian informasi dan penatausahaan hasil pengurusan piutang negara dan lelang serta pengoptimalan penanganan perkara.

## B. PENGUKURAN KINERJA

Untuk mengetahui capaian indikator kinerja tahun 2022, KPKNL berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%;
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi *maximiza* semua agar sebanding dengan yang lainnya;
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks capaian IKU;
4. IKU yang ditetapkan, diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target;
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%;
  - b. Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.



Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Maximize*

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

IKU yang memiliki polarisasi *maximize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan.

2. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Minimize*

$$\text{Indeks Capaian} = [1 + (1 - \text{Realisasi/Target})] \times 100\%$$

3. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki *Stabilize*

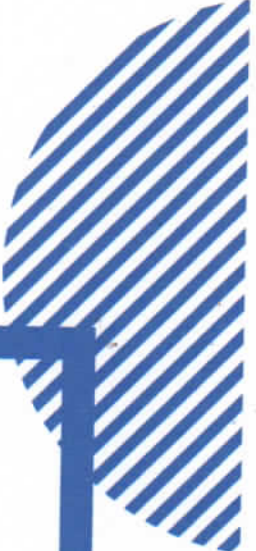

$$C_{n+1} - C_n$$

$I_n$  = Indeks capaian  
 $I_{n-1}$  = Indeks capaian di bawahnya  
 $I_{n+1}$  = Indeks capaian di atasnya  
 $C_a$  = Capaian awal  
 $C_n$  = Realisasi/target x 100%  
 $C_n$  = Capaian dengan ketentuan:

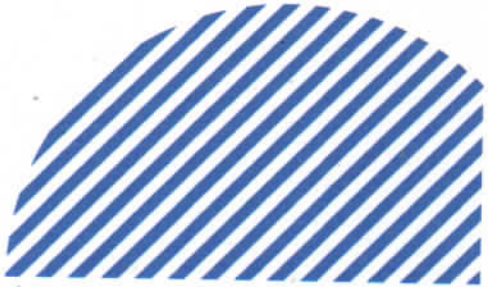
- a. Apabila Realisasi > Target, maka:  
 $C_n = 100 - (C_a - 100)$ , di mana  $C_a$  maksimum adalah 200%
- b. Apabila Realisasi < Target, maka:  
 $C_n = C_a$   
 $C_{n-1}$  = Capaian di bawahnya  
 $C_{n+1}$  = Capaian di atasnya

$$I = I + \frac{I_{n+1} - I_n}{C_n - C_{n-1}} (C_n - C_{n-1})$$

IKU yang memiliki polarisasi *stabilize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja diharapkan berada dalam suatu rentang target tertentu. Apabila hasil perhitungan nilai capaian IKU melampaui target, akan menghasilkan nilai maksimal 120%. Karena IKU *stabilize* mengharapkan capaian dalam rentang tertentu di sekitar target, maka capaian yang dianggap paling baik adalah capaian yang tepat sesuai dengan target.



**BAB III**  
**AKUNTABILITAS**  
**KINERJA**

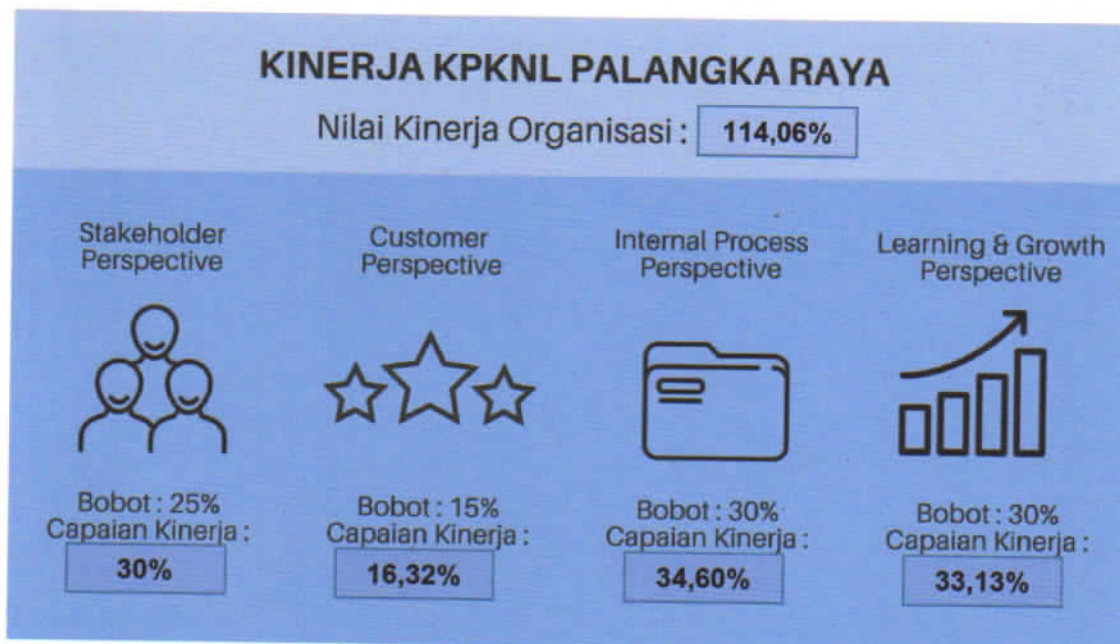


## A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja KPKNL Palangka Raya tahun 2022 dilakukan melalui evaluasi dan pengukuran pencapaian sasaran dan IKU. Pada tahun 2022, KPKNL Palangka Raya telah menetapkan 11 sasaran strategis :

1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian;
2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa;
3. Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi;
4. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal;
5. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional;
6. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif;
7. Edukasi yang Efektif;
8. Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif;
9. SDM yang Kompeten;
10. Organisasi yang Fit For Purpose;
11. Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal

Untuk mencapai 11 Sasaran Strategis tersebut, pada tahun 2022 KPKNL Palangka Raya menetapkan 19 IKU. Berdasarkan hasil pengukuran, rata-rata tingkat pencapaian sasaran pada tahun 2022 sebesar 114,06%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing masing perspektif. Berikut penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis :



### **Sasaran Strategis 1 : Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian**

Kekayaan Negara adalah semua bentuk kekayaan hayati dan non hayati berupa benda berwujud maupun tidak berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dikuasai dan /atau dimiliki oleh Negara. Untuk menjalankan amanat UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Kekayaan Negara harus dikelola secara akuntabel dan produktif oleh Kementerian Keuangan.

### **Sasaran Strategis 2 : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa**

Pengelolaan Kekayaan yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan konsumen ketika menggunakan layanan kekayaan negara. "Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara (BMN), kekayaan negara dipisahkan (KND), kekayaan negara lain-lain (KNL), penilaian, piutang negara, dan lelang.

Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi:

- 1) perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND;
- 2) pengurusan piutang negara; dan
- 3) pelayanan lelang.

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila:

- 1). Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (zero idle)
- 2). Adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (cost saving) dan PNB (revenue generating).
- 3). Tingginya turn over penggunaan BMN persediaan (saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum)
- 4). Adanya manfaat ekonomi (selain cost saving dan revenue), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset. Misal diukur dengan monetisasi dampak pembangunan aset bagi masyarakat."

### **Sasaran Strategis 3 : Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik yang prima ditandai dengan terpenuhinya seluruh aspek penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi, sarana dan prasarana, biaya/tarif pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja sehingga berdampak pada terwujudnya kepuasan dan terpenuhinya harapan pengguna layanan (exceeding customer needs).

Pemenuhan layanan publik diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan oleh lembaga independen berdasarkan pemenuhan atas asas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu: (a) kepentingan umum; (b) kepastian hukum; (c) kesamaan hak; (d) keseimbangan hak dan kewajiban; (e) keprofesionalan; (f) partisipatif; (g) persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif; (h) keterbukaan; (i) akuntabilitas; (j) fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; (k) ketepatan waktu; dan (l) kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

#### **Sasaran Strategis 4 : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal**

Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi : 1) perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas Barang Milik Negara (BMN), Kekayaan Negara Lainnya (KNL), dan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND). 2) Pengurusan piutang Negara serta 3) Pelayanan lelang. Pengelolaan kekayaan Negara dikatakan optimal apabila seluruh BMN, KNL, dan KND telah terutilisasi sesuai potensi tertinggi dan terbaiknya dan pengelolaan BMN, KNL, KND, Piutang Negara dan Lelang mampu mendorong efektifitas, efisiensi dan penerimaan Negara.

#### **Sasaran Strategis 5 : Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional**

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian.

Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (good governance) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna.

#### **Sasaran Strategis 6 : Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif**

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian. Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (good governance) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna.

#### **Sasaran Strategis 7 : Edukasi yang Efektif**

Edukasi merupakan kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, pemberian masukan, konsultasi atau arahan yang dilaksanakan dalam lingkup internal maupun eksternal. Kegiatan

ini bertujuan untuk meningkat pemahaman atas proses suatu bisnis yang harus dilakukan baik oleh pihak internal maupun eksternal sehingga *output* yang ditetapkan dalam suatu pekerjaan dapat tercapai. Ruang lingkup edukasi antar lain edukasi internal dari atasan/unit superintenden kepada bawahan/unit yang diawasi dan edukasi eksternal dari kantor wilayah/Kepala kepada pengguna layanan/masyarakat umum. Materi edukasi meliputi pengelolaan barang milik negara, kekayaan negara lain-lain, kekayaan negara dipisahkan, pengurusan piutang negara dan lelang.

#### **Sasaran Strategis 8 : Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif**

Pengendalian merupakan tindakan preventif dan korektif yang dilaksanakan apabila dari hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala. Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku..

Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada Pengguna Barang terutama terkait tindak lanjut pengelolaan BMN. IKU ini difokuskan pada pemantauan tindak lanjut persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan.

#### **Sasaran Strategis 9 : SDM yang Kompeten**

SDM yang kompetitif adalah SDM yang memiliki kepemimpinan yang tepat, mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan kompetensi. Pengembangan kompetensi bagi pegawai DJKN di lingkungan DJKN merupakan upaya pengembangan, pengetahuan, keterampilan, dan/atau sikap perilaku pegawai dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Pengembangan kompetensi pegawai mengacu pada PMK Nomor 216 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pengembangan SDM di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran dilakukan dengan mengukur persentase banyaknya pegawai yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangan pegawai.

#### **Sasaran Strategis 10 : Organisasi yang Fit For Purpose**

Organisasi yang *fit-for-purpose* adalah organisasi yang memiliki desain struktur dan mekanisme kerja (*value chain*) yang selaras dengan tujuan organisasi

#### **Sasaran Strategis 11 : Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal**

Penguatan Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban

pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK. Pengelolaan BMN yang optimal apabila seluruh BMN Kemenkeutelah dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan satker. Upaya untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang optimal dilakukan melalui tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi.

## B. KINERJA LAINNYA

### 1. Penanganan Perkara

Jumlah perkara/gugatan perdata di pengadilan yang ditangani oleh KPKNL pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No	Nomor Perkara	Tahap Pengadilan
1	172/Pdt.G/2022/PN Plk	Proses di Tingkat Pengadilan Negeri
2.	26/Pdt.G/2022/PN Kik	Proses di Tingkat Pengadilan Negeri
3.	112/Pdt.G/2022/PN Plk	Proses di Tingkat Pengadilan Negeri
4.	52/Pdt.G/2022/PN.PIk	Proses di Tingkat Pengadilan Tinggi
5.	2/Pdt.G/2022/PN.Kik	Proses di Tingkat Mahkamah Agung
6.	205/Pdt.G/2021/PN.PIk	Proses di Tingkat Mahkamah Agung
7.	52/Pdt.G/2019/PN.PIk	Proses di Tingkat Mahkamah Agung
8.	2/Pdt.G/2021/PN Ksn	Selesai/Menang
9.	160/Pdt.G/2021/PN.PIk	Selesai/Menang
10.	18/Pdt.BTH/2021/PN.Ksn	Selesai/Menang
11.	2/Pdt.G/2022/PN.Bjm	Selesai/Dicabut
12.	151/Pdt.G/2022/PN.PIk	Selesai/Damai

### 1. Pelayanan Penilaian

Salah satu fungsi KPKNL Palangka Raya adalah melaksanakan pelayanan penilaian. Dalam rangka penilaian kekayaan negara, penilaian bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan aktual tentang jumlah dan nilai kekayaan negara. Pelaksanaan pelayanan penilaian tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Permohonan Penilaian	Jumlah Laporan
1	Pemindahtanganan BMN	186
2.	Pemanfaatan BMN	56
3.	Penilaian Barang Sitaan/Rampasan	26
4.	Pemindahtanganan BMD	66

### 2. Penghargaan

Di tahun 2022, KPKNL berhasil mendapatkan penghargaan dari Direktorat Lelang DJKN atas partisipasinya sebagai Peserta Tingkat Nasional pada kegiatan Kompetisi dan Onovasi Kedai Lelang Produk UMKM Tahun 2022.



### C. REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Palangka Raya, pada tahun 2022 KPKNL Palangka Raya telah mendapat alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebesar Rp 1.718.456.000,00. Dari jumlah tersebut dapat terealisasi sebesar Rp 1.605.830.185,00 atau 93,45% dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Belanja	Pagu Awal	Pagu setelah revisi	Realisasi	
			Tahun 2022	%
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0
2. Belanja Barang	1.702.099.000	1.718.456.000	1.605.830.185	93.45%
3. Belanja Modal	0	0	0	0
	1.702.099.000	1.718.456.000	1.605.830.185	93.45%

Pandemi Covid-19 memberi tekanan yang cukup tinggi pada kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk fokus kepada 3 (tiga) pembiayaan yaitu kesehatan, perlindungan sosial bagi masyarakat miskin tidak mampu dan pemberian dukungan bagi dunia usaha. KPKN Palangka Raya berpartisipasi melakukan efisiensi dan realokasi anggaran dalam pemulihan ekonomi nasional.



# **BAB IV**

# **PENUTUP**

## A. PENUTUP

Laporan Kinerja KPKNL Palangka Raya tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan KPKNL Palangka Raya dalam tahun anggaran 2022 yang disusun sebagai pelaksanaan terhadap instruksi Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Palangka Raya tahun 2022 telah ditetapkan sesuai dengan peta strategi Kemenkeu *Three* KPKNL yang terdiri 11 (sebelas) sasaran strategis dengan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU), rata-rata tingkat pencapaian sebesar 114,06%. IKU KPKNL Palangka Raya yang telah melampaui target yang ditetapkan adalah :

1. Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK
2. Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang (PNBP)
3. Persentase penurunan nilai *outstanding* piutang negara
4. Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang
5. Persentase realisasi pokok lelang
6. Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL
7. Persentase bidang tanah BMN yang disertifikasi
8. Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (Portofolio aset)
9. Deviasi ketergunaan hasil penilaian
10. Persentase efektivitas penyelesaian BKPN
11. Persentase produktivitas lelang
12. Persentase pelaksanaan lelang *e-auction* dan *e-conventional auction*
13. Deviasi data PNBP fungsional DJKN
14. Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi
15. Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara
16. Persentase pengembangan kompetensi pegawai
17. Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM
18. Nilai review pengelolaan kinerja
19. Indeks efektivitas pelaksanaan FGD pejabat administrator

Sedangkan IKU KPKNL Palangka Raya yang masuk dalam kategori kuning yaitu persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2022 dan kondisi/permasalahan yang terjadi seluruh personel KPKNL Palangka Raya bertekad untuk meraih prestasi kinerja yang lebih baik dengan melaksanakan rencana kegiatan tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan optimal.

The page features four decorative semi-circular shapes: a solid blue one on the left, a blue and white striped one in the top right, a solid blue one in the bottom right, and another blue and white striped one in the bottom right. A blue rectangular border frames the central text.

# LAMPIRAN



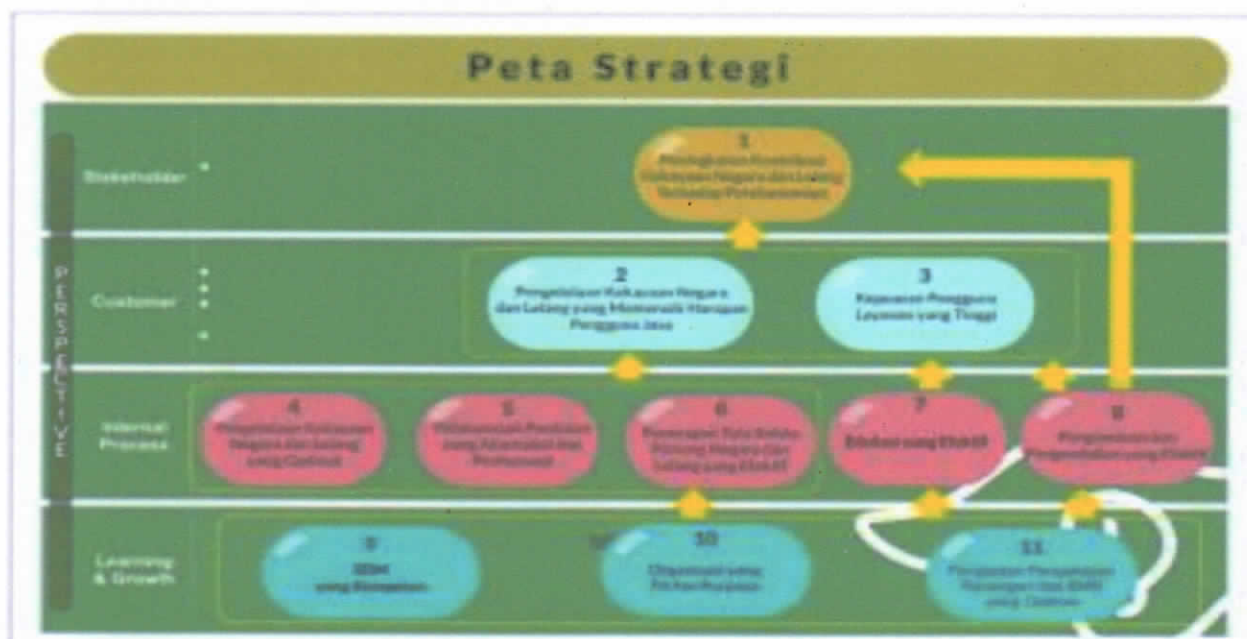
**KONTRAK KINERJA  
NOMOR: 07/KN.24/2022  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
PALANGKARAYA  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2022**

**Pernyataan Kesanggupan**

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Palangkaraya, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Peta Strategi**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**  
**PALANGKARAYA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	01 Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	1a-CP Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
		1b-CP Persentase produktivitas lelang	36%
2	02 Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
		2b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%
3	03 Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	3a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,55
4	04 Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	4a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%
		4b-CP Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	100%
		4c-CP Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
		4d-CP Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
5	05 Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	5a-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%
6	06 Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	6a-CP Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%
		6b-CP Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	10%
7	07 Edukasi yang Efektif	7a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	88
8	08 Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	8a-CP Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan pengelolaan kekayaan negara	85%
9	09 SDM yang Kompeten	9a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
10	10 Organisasi yang Fit For Purpose	10a-N Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	80
		10b-N Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90
11	11 Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	11a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%
		11b-N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%



	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>
<b>CD</b>	<b>Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko</b>	<b>Rp 184,126,000</b>
	CD.4796 Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp 5,269,000
	CD.4798 Pengelolaan Aset	Rp 178,857,000
<b>WA</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp 1,517,973,000</b>
	WA.4700 Legislasi dan Litigasi	Rp 2,867,000
	WA.4701 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 1,511,580,000
	WA.4702 Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp 448,000
	WA.4704 Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp 3,078,000

Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan  
Selatan dan Tengah



Ditandatangani Secara Elektronik  
Ferdinan Lengkong

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan  
Lelang Palangkaraya



Ditandatangani Secara Elektronik  
R.B. Sigit Budi Prabowo

**RINCIAN TARGET KINERJA  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
PALANGKARAYA  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2022**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	01 Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian							
1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	20%	25%	25%	30%	30%	36%	36%
2	02 Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
3	03 Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi							
3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	-	-	-	-	-	4,55	4,55
4	04 Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	-	50%	50%	55%	55%	65%	65%
4b-CP	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	20%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4d-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
5	05 Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
5a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%
6	06 Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
6a-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
6b-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
7	07 Edukasi yang Efektif							
7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	-	88	88	-	88	88	88
8	08 Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							
8a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan pengelolaan kekayaan negara	-	40%	40%	-	40%	85%	85%
9	09 SDM yang Kompeten							
9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
10	10 Organisasi yang Fit For Purpose							
10a-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	-	-	-	-	-	80	80
10b-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90	90	90	90	90	90	90
11	11 Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal							
11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%
11b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	10%	50%	50%	85%	85%	100%	100%

PNS yang dinilai,



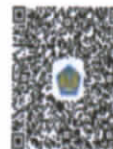
Ditandatangani Secara Elektronik

R.B. Sigit Budi Prabowo

**INISIATIF STRATEGIS**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALANGKARAYA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2022**

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Anggaran
				Kegiatan	Output			
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian/ Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Kompetisi Inovasi Manajer Aset (KOIN MAS) DJKN	Jumlah aset yang diberdayakan dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat	Q1: Inventarisasi terhadap aset yang akan diberdayakan/dimanfaatkan	Q1: Daftar Aset yang akan diberdayakan/dimanfaatkan	Q1 s.d. Q4	Seksi PKN	-
				Q2: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q2: Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q3: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q3: Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q4: Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Q4: Laporan Hasil Evaluasi Kegiatan			

PNS yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik  
**R.B. Sigit Budi Prabowo**

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2022



## Sasaran Kerja Pegawai

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN

1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	R.B. Sigit Budi Prabowo	NAMA	Ferdinan Lengkong
NIP	196609141993031002	NIP	196612121991031001
PANGKAT/GOL RUANG	Pembina Tingkat I, IV/b	PANGKAT/GOL RUANG	Pembina Utama Madya, IV/d
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Palangkaraya	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah

NO (1)	RENCANA KINERJA (2)	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (3)	TARGET (4)
<b>A. KINERJA UTAMA</b>			
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
2	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	Persentase produktivitas lelang	36%
3	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%
5	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,55
6	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%
7	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	100%
8	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
9	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%



10	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%
11	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%
12	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	Deviasi Data PNBFP Fungsional DJKN	10%
13	Edukasi yang Efektif	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	88
14	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan pengelolaan kekayaan negara	85%
15	SDM yang Kompeten	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
16	Organisasi yang Fit For Purpose	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	80
17	Organisasi yang Fit For Purpose	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator?	90
18	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%
19	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%

#### B. KINERJA TAMBAHAN

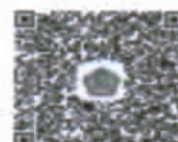
Pegawai yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik  
**R.B. Sigit Budi Prabowo**  
 NIP 196609141993031002

Banjarbaru, 31 Januari 2022

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik  
**Ferdinan Lengkong**  
 NIP 196612121991031001

